

**PENGARUH MEKANISME *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* DAN
INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP
MANAJEMEN LABA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**FACHRONY
NIM. C2C009228**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Fachrony
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009228
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Independensi Auditor terhadap Manajemen Laba**
Dosen Pembimbing : Herry Laksito, S.E, M.Adv, Acc., Akt

Semarang, 16 Juni 2015

Dosen Pembimbing

Herry Laksito, S.E, M.Adv, Acc., Akt

NIP. 196905061999031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Fachrony
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009228
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP MANAJEMEN LABA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 Juni 2015

Tim Penguji :

1. Herry Laksito, S.E, M.Adv, Acc., Akt (.....)
2. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fachrony, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Independensi Auditor terhadap Manajemen Laba** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juni 2015

Yang membuat pernyataan,

Fachrony

NIM. C2C009228

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the influence of good corporate governance mechanisms like institutional ownership, managerial ownership, independent directors and audit committee towards earnings management in manufacturing companies. As well as to test the influence of auditor's independency towards earnings management in manufacturing companies. Leverage, audit quality, profitability and company's size used as control variable.

The population in this study consists of all listed firms in Indonesia Stock Exchange in year 2010-2014. Sampling method used is purposive sampling. Based on the sampling criteria established that the companies that have the managerial ownership, as well as independent directors during the years 2010 to 2014 obtained by 45 companies. By using the method of merging data during 5 years of observation were obtained by 45 x 5 or obtained as many as 225 periods of data observations. After going through the stage of data processing, there are 11 outliers that should be excluded from the sample, so that the proper amount of the final sample is observed that as many as 214 of data observations. Data were analyzed using multiple regression analysis.

The empirical result of this study show that institutional ownership and managerial ownership have positively significant influenced on earnings management. Independent directors has negatively significant influenced on earnings management. Audit committee and auditor's independency had no significant influenced on earnings management.

Keyword: *good corporate governance mechanisms, auditor's independency, leverage, audit quality, profitability, company's size, earnings management.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga menguji pengaruh independensi auditor terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol yaitu *leverage*, kualitas auditor, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Metode *sampling* dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan yaitu pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan saham manajerial, serta komisaris independen selama tahun 2010 hingga 2014 diperoleh sebanyak 45 perusahaan. Dengan menggunakan metode penggabungan data selama pengamatan 5 tahun tersebut diperoleh sebanyak 45 x 5 periode atau diperoleh sebanyak 225 data amatan. Setelah melalui tahap pengolahan data, terdapat 11 data *outlier* yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga jumlah sampel akhir yang layak diobservasi yaitu sebanyak 214 data amatan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Variabel komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel komite audit dan independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Kata kunci : Mekanisme *good corporate governance*, independensi auditor, *leverage*, kualitas audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, manajemen laba

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang ada pada diri mereka, ”

(Ar Raad : 11)

**“ Eksis adalah untuk berubah, berubah berarti menjadi dewasa,
menjadi dewasa berarti terus mencipta diri tanpa henti. “**

(Henry Bergson)

**“ Ingatlah selalu bahwa kamu tidak hanya mempunyai hak untuk
menjadi seorang individu. Adalah tugasmu untuk menjadi seseorang. “**

(Eleanor Roosevelt)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Abah, Mama, Kakak dan Adikku tersayang

Keluarga besar R2 Akuntansi 2009

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ **Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Independensi Auditor terhadap Manajemen Laba** ” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Herry Laksito, S.E, M.Adv, Acc., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.
4. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberi waktu dan saran yang berguna bagi penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.

6. Kedua orang tua tercinta, Drs. Fauzi dan Hj. Mariyam dan saudara, Sherlia dan Nurnadia. Terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang telah diberikan.
7. Sahabat perjuangan “Payung”, Annas, Hemi, Geygy, David, Wibi, Yudha, Rino, Luanda, Dimas, Galih, Theo, Santi, Okta, Kono, Glory, Didot, Hani.
8. Sahabat seperjuangan Akuntansi R2 2009 Tito, Adit, Farid, Rahmat dan Daus. Terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang telah diberikan.
9. Teman-teman KKN Desa Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu: Mbak Lilia, Mas Khusnul, Wimba, Gita dan Febri.
10. Keluarga besar Akuntansi Undip R2 2009, terimakasih untuk proses belajar bersama-sama yang memberikan arti, semoga kita semua sukses dan dapat menjaga silaturahmi sampai kapanpun.
11. Untuk keluarga besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip dari angkatan 2007-2012. Terimakasih telah menjadi sarana perkembangan pribadi penulis melalui berbagai pengalaman bersama kalian. Semoga kita semua sukses.
12. Untuk keluarga besar Undip. Terimakasih telah menjadi sarana pribadi penulis melalui berbagai pengalaman bersama kalian. Semoga kita semua sukses.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, bantuan, doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai

masukan bagi penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak terkait.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Juni 2015

Penulis

Fachrony

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1. Teori Agensi	13
2.1.2. Good Corporate Governance	17
2.1.2.1. Dewan Komisaris Independen	21

2.1.2.2.	Kepemilikan Institusional	22
2.1.2.3.	Kepemilikan Manajerial	23
2.1.2.4.	Komite Audit	24
2.1.3.	Independensi Auditor	27
2.1.4.	Manajemen Laba	30
2.2.	Penelitian Terdahulu	32
2.3.	Kerangka Pemikiran	42
2.4.	Pengembangan Hipotesis	44
2.4.1.	Manajemen Laba	44
2.4.2.	Good Corporate Governance	46
2.4.3.	Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba	46
2.4.4.	Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba	47
2.4.5.	Komite Audit dan Manajemen Laba	49
2.4.6.	Komisaris Independen dan Manajemen Laba	50
2.4.7.	Independensi Auditor dan Manajemen Laba	52
BAB III	METODE PENELITIAN	54
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	54
3.1.1.	Variabel Penelitian	54
3.1.2.	Definisi Operasional	55
3.1.2.1.	Variabel Dependen	55
3.1.2.2.	Variabel Independen	56
3.1.2.3.	Variabel Kontrol	58
3.2.	Populasi dan Sampel Penelitian	60
3.3.	Jenis dan Sumber Data	61
3.4.	Metode Pengumpulan Data	61

3.5. Metode Analisis Data	61
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif	61
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	62
3.5.2.1. Uji Normalitas	62
3.5.2.2. Uji Multikolonieritas	63
3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas	63
3.5.2.4. Uji Autokorelasi	64
3.5.3. Uji Hipotesis	65
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	67
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	67
4.2. Analisis Data	68
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	68
4.2.2. Analisis Regresi	72
4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik	72
4.2.2.1.1 Uji Normalitas	72
4.2.2.1.2 Uji Multikolinieritas	74
4.2.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas	76
4.2.2.1.3.1 Uji Glejser	76
4.2.2.1.4 Uji Autokorelasi	77
4.2.2.2 Analisis Regresi Berganda	78
4.2.2.3 Overall Test	80
4.2.2.4 Koefisien Determinasi (R^2)	81
4.2.2.5 Pengujian Hipotesis	81
4.3 Pembahasan	86
4.3.1 Hipotesis 1	86

4.3.2 Hipotesis 2	87
4.3.3 Hipotesis 3	89
4.3.4 Hipotesis 4	90
4.3.5 Hipotesis 5	91
4.3.6 Variabel Kontrol	93
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Keterbatasan Penelitian	96
5.3 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	69
Tabel 4.2 Uji Normalitas Awal.....	73
Tabel 4.3 Uji Normalitas Kedua.....	74
Tabel 4.4 Uji Multikolonieritas.....	75
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas Model Regresi.....	76
Tabel 4.6 Uji Glejser.....	77
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi Model Regresi.....	78
Tabel 4.8 Hasil Regresi.....	79
Tabel 4.9 Uji F.....	80
Tabel 5.0 Koefisien Determinasi.....	81
Tabel 5.1 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan yang menjadi Sampel Penelitian.....	107
Lampiran B Tabulasi Data.....	110
Lampiran C Hasil Output SPSS.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dibahas beberapa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian terkait dengan mekanisme *good corporate governance* dan independensi auditor terhadap manajemen laba. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Secara lebih lengkap bab pendahuluan dari penelitian ini disajikan sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah sumber informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Karena laporan keuangan adalah catatan atau ringkasan transaksi yang telah dibukukan perusahaan dalam satu periode akuntansi, sehingga laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan menggambarkan beberapa metode-metode akuntansi yang digunakan perusahaan, metode akuntansi yang digunakan akan disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Peraturan tentang pelaporan keuangan dan akuntansi telah memberikan peluang untuk melakukan manajemen laba, contohnya seperti fleksibilitas tentang beberapa metode akuntansi yang berbeda. Menurut PSAK 16 revisi 2007 tentang pengakuan dan pengukuran aset tetap, terdapat beberapa pilihan atau alternatif perlakuan akuntansi. Karena itu, penelitian yang berhubungan dengan manajemen laba

telah mendapat perhatian dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan transaksi perusahaan.

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Tindakan campur tangan manajemen terhadap laporan keuangan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan. Manajemen laba bisa juga mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, selain itu, manajemen laba mengakibatkan investor tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Kasus terkemuka seperti Bank Lippo di Indonesia ternyata membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi perbedaan informasi antara pihak manajemen dan eksternal yang mengakibatkan adanya celah bagi terjadinya praktek *earning management*. Dalam kasus tersebut terjadi perbedaan laporan keuangan yang disampaikan ke publik dan ke manajemen BEJ. Dalam laporan keuangan yang disampaikan ke publik per 30 September 2002 pada 28 November 2002 telah dilaporkan bahwa total aktiva perseroan Rp 24 triliun dan laba bersih Rp 98 miliar. Akan tetapi laporan tersebut berbanding terbalik dengan laporan keuangan yang disampaikan Bank Lippo ke BEJ pada 27 Desember 2002 dengan total aktiva perusahaan berubah menjadi Rp 22,8 triliun rupiah (turun Rp 1,2 triliun) dan perusahaan merugi bersih Rp1,3 triliun. Karena skandal tersebut, harga per lembar saham dari Bank Lippo terus mengalami penurunan setiap harinya. Dari kasus tersebut dapat dilihat adanya perbedaan informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan dan perbedaan informasi tersebut dapat dijadikan celah terjadinya praktek *earnings management*.

Dalam konteks Indonesia, hasil riset Leuz *et al.* (2003) menunjukkan bahwa karena lingkungan perlindungan investor yang lemah maka praktek manajemen laba di Indonesia cenderung lebih intensif dilakukan dibanding negara-negara lain dengan perlindungan investor yang kuat. Semua perusahaan yang telah *go public* dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelum dipublikasikan kepada publik sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM No Kep. 17/PM/2002. Dalam menjalankan profesinya, auditor dituntut untuk memiliki sikap independen dalam mendeteksi kemungkinan perilaku menyimpang atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini telah diatur melalui keputusan Menteri Keuangan no. 423/KMK-06/2002 yang mengatur mengenai rotasi wajib bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik tidak diperbolehkan memberikan jasa nonaudit di samping jasa audit itu sendiri karena dapat mengganggu independensi auditor.

Scott (2000:296) menyatakan bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk suatu tujuan tertentu disebut dengan manajemen laba. Terkait dengan informasi laba, *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)* No. 1 menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggung-jawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu para pengguna laporan keuangan dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, manajemen mempunyai kecenderungan melakukan tindakan untuk memberikan laporan keuangan yang

atraktif. Perilaku manajer yang melakukan manajemen laba dapat diminimalisir dengan menerapkan mekanisme *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk membatasi timbulnya masalah asimetri informasi yang dapat mendorong terjadinya manajemen laba (Dye 1998), Trueman dan Titman (1988) yang dikutip dari Darmawati (2003). *Corporate governance* didefinisikan Rezaee (dalam Warsono, dkk., 2009) sebagai proses yang diakibatkan oleh mekanisme hukum, peraturan, kontraktual, dan berdasarkan keadaan pasar dan merupakan praktik terbaik untuk menciptakan nilai yang substansial bagi para *shareholders* dengan melindungi kepentingan para *shareholders* yang lain. Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan komite audit dan komisaris independen. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang besar diyakini dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil penelitian Rajgopal *et al.* (1999) dan Darmawati (2003).

Keberadaan komite audit dan komisaris independen dalam suatu perusahaan juga terbukti efektif dalam mencegah praktik manajemen laba, karena keberadaan komite audit dan komisaris independen bertujuan untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gul *et al.* (2005) ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Salah satu indikator tersebut adalah ukuran KAP tempat auditor bekerja. Pada KAP yang lebih besar diasumsikan audit yang dilaksanakan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil

karena adanya kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan audit, termasuk menjalankan prosedur-prosedur audit yang baku (Siregar dan Utama 2002).

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba adalah independensi auditor, yang diproksikan menggunakan lamanya penugasan audit yang digolongkan menjadi 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun (Welvin I Guna dan Herawaty 2010). Casterella *et al.* (2002) dalam *working paper*-nya, menyimpulkan bahwa kualitas audit rendah ketika masa penugasan auditor lama dan tinggi ketika masa penugasan auditor pendek. Penelitian Carcello dan Nagy (2004) menemukan hasil yang berbeda. Hasil penelitian Carcello dan Nagy (2004) menemukan bahwa manajemen laba lebih mungkin terjadi pada periode pertama dari tiga tahun penugasan audit. Penelitian ini gagal membuktikan bahwa manajemen laba lebih mungkin terjadi ketika masa penugasan auditor terlalu panjang. Independensi auditor merupakan suatu hal penting yang sudah sejak lama menjadi pembicaraan baik di kalangan praktisi, pembuat kebijakan ataupun para akademisi. Hal ini dikarenakan pendapat yang diberikan oleh auditor berkaitan dengan kepentingan banyak pihak.

Namun demikian pendapat yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan suatu perusahaan tidak akan mempunyai nilai apabila auditor tersebut dianggap tidak memiliki independensi oleh para pengguna laporan keuangan. Auditor yang independen seharusnya dapat menjadi pelindung terhadap praktek-praktek akuntansi yang memperdayakan, karena auditor tidak hanya dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang akuntansi tetapi juga dapat

berhubungan dengan *audit committee* dan dewan direksi yang bertanggung jawab untuk memeriksa dengan teliti para pembuat keputusan di perusahaan. Melihat pentingnya penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan pentingnya peranan auditor dalam mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan, memberikan motivasi untuk melaksanakan penelitian yang dapat mendeteksi pengaruh dari tata kelola perusahaan yang baik dan peranan auditor dalam mengaudit laporan keuangan terhadap kecenderungan dilakukannya manajemen laba.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Gul *et al.* (2005) dan Welvin I Guna dan Herawaty (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) jumlah sampel, sebanyak 45 sampel perusahaan manufaktur yang dipakai, perusahaan manufaktur dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini untuk mencegah terjadinya bias dalam perhitungan *discretionary accruals* dalam mendeteksi manajemen laba, selain itu perusahaan manufaktur merupakan perusahaan bertaraf besar dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan perekonomian di Indonesia dan komponen laba yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur disajikan secara jelas dan detail, sehingga aktivitas manajemen laba dapat diamati dari komponen laba tersebut; (2) mengubah variabel independen yaitu kualitas audit, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol; (3) tahun penelitian, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Manajemen laba merupakan tindakan pengolahan informasi yang

dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga pelaporan keuangan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Manajer sebagai pihak yang berhubungan dengan pelaporan keuangan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terhadap berbagai transaksi ekonomi yang terjadi dalam kegiatan perusahaan. Tingkat keefisienan dan perbedaan tingkat informasi antara pemilik dan manajemen dapat memunculkan peluang terjadinya manajemen laba. Penelitian Isnugrahadi dan Kusuma (2009) meneliti pengaruh kecakapan manajerial terhadap manajemen laba dan menggunakan kualitas auditor sebagai variabel pemoderasi, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kecakapan manajerial yang tinggi berpengaruh positif terhadap tingkat manajemen laba. Sedangkan kualitas auditor sebagai bentuk pengendalian pemilik terhadap manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini berbeda dengan penelitian Rusmin (2010) yang menyatakan bahwa auditor spesialis memiliki kemampuan lebih untuk mencegah manajemen laba.

Mekanisme *corporate governance* bisa diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut atau disebut juga dengan mekanisme *monitoring*. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Syakhroza, 2002). Terdapat beberapa mekanisme *monitoring* dengan indikator-indikator yang terkait dengan mekanisme *corporate governance* dalam meminimalkan manajemen laba tersebut. Pertama, kepemilikan saham oleh institusional karena mereka dianggap sebagai

sophisticated investor dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Teori tersebut dapat dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Amerika oleh Cornet et al., (2008). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh penelitian Siregar dan Utama (2005) dan Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang merumuskan bahwa proporsi kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan laba. Kedua ukuran dewan komisaris sebagai salah satu komponen *good corporate governance*. Hasil penelitian yang dilakukan Beasley (1996), Yermarck (1996), Jensen (1993) dan Klein (2002) menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kecurangan dalam pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Mekanisme *corporate governance* yang berperan penting dalam mengatasi manajemen laba juga memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan seperti yang dibuktikan oleh Klapper dan Love (2002) dan Brown and Caylor (2006). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *corporate governance* yang lebih baik mempunyai korelasi yang tinggi terhadap kinerja operasi (dilihat dari *Return on Asset/ROA*, *Gross Margin*, dan *Return on Equity/ROE*). Selanjutnya penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* kinerja perusahaan di Indonesia, Darmawati, Khomsiyah dan Rahayu (2004) menyimpulkan bahwa *corporate governance* hanya memiliki keterkaitan

dengan kinerja operasi perusahaan tetapi belum mampu mempengaruhi kinerja pasar. Lestari (2007) mengatakan bahwa ada beberapa faktor pada *corporate governance* yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh pada kinerja profitabilitas. Sedangkan kepemilikan asing dan auditor eksternal memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja profitabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan Apriyanti (2008) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan komite audit tidak terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas.

Komite audit merupakan bentuk pengendalian secara internal yang dilakukan pemilik, penelitian mengenai komite audit antara lain dilakukan oleh Pamudji dan Trihartati (2009), dalam penelitian ini komite audit diukur menggunakan independensi, keahlian di bagian keuangan, frekuensi pertemuan dan komitmen waktu. Sedangkan, ukuran perusahaan dan *leverage* menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini, pengujian terhadap variabel ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik perusahaan yang melakukan manajemen laba berdasarkan kondisi keuangan perusahaan.

Independensi auditor merupakan suatu hal penting yang sudah sejak lama menjadi pembicaraan baik di kalangan praktisi, pembuat kebijakan ataupun para akademisi. Hal ini dikarenakan pendapat yang diberikan oleh auditor berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Namun demikian pendapat yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan suatu perusahaan tidak akan mempunyai nilai apabila auditor tersebut dianggap tidak memiliki independensi oleh para

pengguna laporan keuangan. Auditor yang independen seharusnya dapat menjadi pelindung terhadap praktek-praktek akuntansi yang memperdayakan, karena auditor tidak hanya dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang akuntansi tetapi juga dapat berhubungan dengan *audit committee* dan dewan direksi yang bertanggung jawab untuk memeriksa dengan teliti para pembuat keputusan di perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh mekanisme *good corporate governance* (proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen) terhadap manajemen laba?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh mekanisme *good corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen terhadap manajemen laba.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh independensi auditor terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan mekanisme *good corporate governance*, dewan direksi dan auditor pada praktik manajemen laba, selain itu penelitian ini memberikan informasi mengenai karakteristik perusahaan yang melakukan manajemen laba dari sisi keuangan.

2. Tinjauan Praktik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai mekanisme *good corporate governance* dan independensi auditor terhadap manajemen laba.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional,

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai: (i) teori agensi yang menjadi landasan teori penelitian ini dan penjabaran mengenai *corporate governance*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, independensi auditor dan manajemen laba, (ii) uraian mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (iii) pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian penelitian terdahulu yang dirangkai dengan kerangka pemikiran.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi, yang berguna untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel adalah teori agensi. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik dan pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen and Meckling, 1976) dalam Putri (2011). *Principal*, disebut juga pemberi wewenang, dapat diartikan sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham dan *agent* merupakan pihak yang diberi wewenang, dapat diartikan sebagai manajemen yang mengelola perusahaan.

Berdasarkan teori dijelaskan bahwa pihak manajemen dalam bekerja menjalankan perusahaan harus mengutamakan kesejahteraan pemilik perusahaan (Rani, 2011). Namun, dalam teori ini terdapat keyakinan bahwa masing - masing individu akan lebih cenderung untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Pemikiran bahwa pihak manajemen dapat melakukan tindakan yang hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri didasarkan pada suatu asumsi yang menyatakan setiap orang mempunyai perilaku yang mementingkan diri sendiri atau *self-interested behaviour*. Keinginan, motivasi dan kepentingan yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi (Rachmawati, 2007) dalam Putri (2011).

Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. *Agent* menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi yang sebesar-besarnya atas kinerjanya. *Principal* menilai prestasi *agent* berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, harga saham dan makin besar deviden, maka *agent* dianggap berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Sebaliknya *agent* pun memenuhi tuntutan *principal* agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka *agent* dapat memainkan beberapa kondisi

perusahaan agar seolah - olah target yang diinginkan tercapai (Wahyudiharto, 2009). Asimetri informasi (*information asymmetry*) dapat memperburuk situasi ini, asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*) (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dalam teori ini, manajemen adalah *agent*, sedangkan stakeholder adalah *principal*.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Dengan adanya asimetri informasi manajer dapat membuat laporan keuangan yang berisi data perusahaan yang dapat mendukung kepentingan pribadinya, misalnya dengan melakukan manajemen laba. Dalam Teori Keagenan, terdapat dua konflik potensial kepentingan yang mungkin muncul yaitu konflik antara *shareholder* dengan manajer dan *shareholder* dengan *bondholder*. Untuk mengatasi atau meminimalisasi konflik keagenan tersebut akan menimbulkan biaya. Biaya ini yang disebut dengan biaya keagenan (Rani, 2011). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya keagenan sebagai berikut:

a. *Monitoring Cost*

Monitoring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh *principals* untuk

mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku manajer.

b. *Bonding Cost*

Bonding Cost adalah biaya pengikatan *agent* agar *agent* bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik perusahaan. Para *agent* akan diberi kompensasi yang wajar dan bila mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemilik kompensasi tersebut tidak akan diberikan.

Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar akan memiliki manajemen yang lebih stabil dan kondisi perusahaan yang lebih stabil. Perusahaan besar akan memiliki pengendalian internal yang memadai di dalam manajemen untuk mencegah konflik agensi yang mungkin terjadi di perusahaan. Dalam sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan, pemilik akan menerapkan pengendalian informasi dan kinerja terhadap para manajer agar bertindak sesuai dengan keinginan *principal*, sedangkan manajer atau *agent* akan diberi insentif untuk tidak melakukan hal yang bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan.

Menurut Emirzon (2007) dalam Ningsaptiti (2011) terdapat tiga asumsi yang mendasari teori keagenan, yaitu: asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak pemilik (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan

ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Tingkat liabilitas perusahaan yang tinggi dapat mengindikasikan perusahaan mengalami konflik agensi, karena pinjaman merupakan salah satu cara manajemen untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan memenuhi keinginan *principal*.

2.1.2 Good Corporate Governance

Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan – hubungan antara *stakeholder* dan mencegah terjadinya kesalahan – kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan serta memastikan adanya perbaikan dengan segera jika terjadi kesalahan. *Corporate Governance* menurut Nasution dan Setiawan (2007) merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. *Corporate Governance* digunakan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang

saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku.

Corporate governance muncul sebagai solusi atas keterbatasan dalam teori keagenan. Dalam teori keagenan, terdapat pemisahan antara pihak agen dan prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik sehingga dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Manajemen akan menyusun laporan laba / rugi demi kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan prinsipal sehingga diperlukan suatu pengendalian untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan tersebut. Apabila tercapai keselarasan kepentingan maka akan meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham sehingga *good corporate governance* dianggap perlu.

Terdapat beberapa maksud dan tujuan penyusunan Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia yang diungkapkan oleh KNKG (2006) yaitu pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing – masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan

tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2002) mendefinisikan *corporate governance* dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu : “ seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan “.

Lebih lanjut, FCGI (2002) menyatakan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah “ untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) “. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas – asas GCG diterapkan di setiap aspek

bisnis dan di semua jajaran perusahaan (KNKG, 2006). Adapun asas – asas GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) di dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, yaitu (KNKG, 2006) :

1. Transparansi (*Transparency*)

“ Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang memiliki kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.”

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

“ Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. “

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

“ Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.”

4. Independensi (*Independency*)

“ Untuk melancarkan pelaksanaan asa GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. “

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

“ Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. “

Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok yaitu (1) Mekanisme internal (*internal mechanism*) seperti komposisi dewan direksi / komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. (2) Mekanisme Eksternal (*external mechanism*) seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing* (Barnhart dan Rosentein, dalam Herawaty, 2008). Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : (1) proporsi dewan komisaris independen, (2) kepemilikan institusional, (3) kepemilikan manajerial dan (4) komite audit.

2.1.2.1 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham mayoritas, serta bebas dari hubungan bisnis dan atau hubungan lainnya

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata – mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak – pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000) dalam (Linoputri, 2010).

Dalam menjalankan fungsinya, dewan komisaris independen harus membebaskan diri dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan menjalankan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang memadai. Wallace dan Peter dalam (Ujiyantho dan Pramuka, 2007) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen, akan meningkatkan pengawasan, sehingga akan mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal ini didukung dengan penelitian Klein dalam (Herawaty 2008) yang berhasil membuktikan bahwa *discretionary accrual* lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki komite audit yang terdiri dari lebih sedikit komisaris independen dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki komite audit yang terdiri dari banyak komisaris independen.

2.1.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional (> 5%) seperti asuransi, bank,

perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (Skousen *et al.*, 2009). Kepemilikan saham institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa *monitoring* yang dilakukan oleh investor institusional tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional dalam perusahaan sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer.

2.1.2.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajer, direksi, komisaris, maupun pihak lain yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan membagi saham yang dimiliki manajemen dengan seluruh jumlah saham perusahaan (Giddeon, dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007).

Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan. Dengan demikian, struktur modal dengan kepemilikan manajemen yang tinggi mampu menurunkan biaya keagenan (Saputri, 2010). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk

meminimalkan konflik keagenan adalah dengan memperbesar kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat diterapkan untuk meminimalisir konflik keagenan yang berakibat pada munculnya tindakan *earnings management* oleh manajer.

2.1.2.4 Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (2004), lahirnya komite audit disebabkan beberapa hal, antara lain belum optimalnya peran pengawasan yang diemban dewan komisaris di banyak perusahaan dan adanya karakteristik umum yang melekat pada entitas bisnis di Indonesia berupa pemusatan kontrol atau pengendalian kepemilikan perusahaan di tangan pihak tertentu atau segelintir pihak saja. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan auditor eksternal. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Komite Audit dibedakan menjadi tiga hal atau karakteristik yaitu komite audit untuk perbankan, BUMN dan perusahaan publik (Effendi, 2005). Pada

kategori perbankan, peraturan tentang komite audit dalam perbankan disebut dengan Dewan Audit, diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995. Pada perusahaan BUMN hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN. Sedangkan pada perusahaan publik ketentuan komite audit diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE03/PM/2000 tertanggal 05 Mei 2000 (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004).

Karakteristik terpenting dalam komite audit adalah independensi. Menurut Agrawal, dkk. (2005) dalam Rani (2011) independensi dalam komite audit dibutuhkan untuk menjaga konflik auditor eksternal, selain itu untuk menilai objektivitas dan independensi auditor eksternal. Sesuai fungsi komite audit, yaitu untuk menjembatani hubungan antara perusahaan dengan auditor eksternal, saat ini peran komite audit dalam perusahaan telah dipertimbangkan dan menjadi sinyal bahwa perusahaan memiliki standar pelaporan yang memadai. Untuk menjamin independensi, Bapepam (2004) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu :

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab

untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.

3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
4. Tidak mempunyai :
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun secara vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
 - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

Selain independensi komite audit, efektivitas komite audit juga merupakan hal yang penting. Efektivitas komite audit dapat diukur melalui jumlah pertemuan, keahlian dibidang keuangan dan komitmen terhadap waktu. Abbot, dkk. (2004) dalam Pamudji dan Trihartati (2009) menemukan bukti bahwa komite audit yang melakukan pertemuan kurang dari jumlah minimum memiliki kemungkinan lebih besar untuk menyajikan kembali labanya, juga ditemukan bukti bahwa kecurangan dan penyajian kembali laba semakin banyak terjadi ketika anggota komite audit tidak memiliki kompetensi di bidang keuangan. Secara periodik komite audit wajib melakukan evaluasi terhadap kinerjanya.

Menurut Sommer Ataina (2000) dalam Pamudji (2009) auditor mempunyai posisi yang strategis untuk mengevaluasi kinerja komite audit, karena komite audit seringkali berhubungan dengan auditor. Apabila komite audit telah memiliki kinerja yang baik, secara tidak langsung perusahaan akan memiliki kontrol yang lebih baik atas laporan keuangan internal perusahaan yang berdampak menurunnya *earnings management*.

2.1.3 Independensi Auditor

Independensi seorang akuntan publik merupakan suatu hal yang bersifat mutlak, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam (Ikatan Akuntan Indonesia 2001) yang berbunyi "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor." Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun kesempurnaan keahlian teknis yang auditor miliki, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur. Untuk diakui oleh pihak lain sebagai orang yang independen, auditor harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, baik dengan manajemen perusahaan ataupun pemilik perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001:220.1).

Auditor juga harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya. Profesi Akuntan Publik telah menetapkan

dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensinya dari masyarakat. Arens *et al.* (2008: 85) juga membagi independensi menjadi dua macam, yang pertama independensi dalam kenyataan (*independence in fact*). Independensi dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Kemudian yang kedua adalah independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Independensi dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini. Jadi independensi dalam penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik secara maupun keseluruhan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap independensi akuntan publik menurut Novianty dan Kusuma (2001:63) antara lain :

1. Jasa-jasa lainnya selain jasa audit. Selain memberikan jasa audit, Kantor Akuntan Publik dapat memberikan jasa-jasa lainnya kepada klien, seperti jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (Ikatan Akuntan Indonesia 2001) jika akuntan publik melakukan jasa pembukuan dan audit pada klien terdapat tiga persyaratan penting yang harus dipenuhi agar dianggap independen, yaitu :
 - b. Klien harus bertanggung jawab atas laporan keuangannya, Klien harus diberitahu dengan secukupnya mengenai aktiva perusahaan dan kondisi keuangan serta prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga klien bisa menerima secara beralasan tanggung jawab

atas laporan keuangan tersebut, khususnya kewajaran penilaian dan penyajian serta kecukupan pengungkapannya. Bila perlu anggota harus mendiskusikan masalah akuntansi dengan klien untuk membantu klien dalam memahami masalah tersebut.

- c. Anggota dilarang berperan sebagai pegawai atau manajemen. Sebagai contoh anggota tidak boleh menyelesaikan transaksi, menyimpan aktiva atau melakukan kewenangan eksekutif atas nama klien. Klien harus menyiapkan dokumen sumber atas transaksi yang cukup rinci untuk mengidentifikasi secara jelas sifat dan jumlah nilai transaksi. Anggota dilarang membuat perubahan atas dokumen dasar tersebut tanpa persetujuan klien karena dokumen dasar tersebut milik klien.
 - d. Bila laporan keuangan disusun oleh anggota dari buku dan catatan yang telah diselenggarakan oleh anggota, maka anggota harus mematuhi standar yang berlaku untuk perikatan audit, *review*, atau kompilasi.
2. Imbalan atau *fee* atas jasa audit. Imbalan atau *fee* atas jasa audit dari klien yang diterima oleh suatu Kantor Akuntan Publik merupakan bagian dari seluruh pendapatan Kantor Akuntan Publik, baik merupakan sebagian besar dari total pendapatan Kantor Akuntan Publik tersebut maupun sebagian kecil dari total pendapatan Kantor Akuntan Publik tersebut. Independensi akuntan publik dapat diragukan jika pembayaran imbalan atas jasa auditnya tergantung kepada manajemen klien yang diauditnya.

2.1.4 Manajemen Laba

Standar akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk memilih beberapa metode alternatif untuk memperlakukan transaksi yang sama, manajemen dapat mengubah jumlah angka yang berkaitan dengan pendapatan maupun beban. Hal ini memberikan manajemen keuntungan dalam menghitung laba perusahaan dan pengukuran keuangan lainnya.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen laba, Sutrisno (2002) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan membentuk transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada *stakeholders* tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Healy dan Wahlen (1998) dalam Handayani dan Rachadi (2009) menyebutkan bahwa manajemen laba adalah proses dimana manajer menggunakan kemampuan deskresi yang dimiliki untuk menyesatkan *stakeholders* atau mempengaruhi hasil kontraktual dengan *owner*. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk mengolah laba melalui pertimbangan manajer sehingga mengakibatkan perubahan informasi yang ada di laporan keuangan, tindakan ini bertujuan untuk menyesuaikan laporan keuangan perusahaan sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan.

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Wangi (2010) mengusulkan tiga hipotesis yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yaitu

sebagai berikut:

1. Hipotesis Program Bonus (*Bonus Plan Hypotesis*). Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer pada perusahaan yang menerapkan bonus lebih cenderung untuk menggunakan metode atau prosedur-prosedur akuntansi yang akan menaikkan laba periode mendatang ke periode berjalan.
2. Hipotesis Perjanjian Liabilitas (*Debt Covenant Hypotesis*). Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* besar atau menghadapi kesulitan liabilitas, maka manajer perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan laba.
3. Hipotesis Kos Politik (*Political Cost Hypotesis*). Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi suatu perusahaan maka manajer cenderung untuk menangguhkan laba berjalan ke masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan menggunakan *Discretionary Accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dihasilkan tidak mencerminkan nilai atau kondisi keuangan yang sesungguhnya.

Meutia (2004) menyatakan konsep model akrual memiliki dua komponen, yaitu komponen *non- discretionary* dan *discretionary*, komponen *discretionary accruals* merupakan bagian yang memungkinkan manajer melakukan intervensinya dalam memanipulasi laba. Hal ini disebabkan manajer memiliki kontrol jangka

pendek terhadap komponen ini, komponen yang termasuk dalam *discretionary accruals* diantaranya penilaian liabilitas, pengakuan biaya garansi dan aset modal (Guna dan Herawaty, 2010).

Manajemen laba telah mengakibatkan beberapa pihak mengalami kerugian, yaitu pemakai informasi laporan keuangan dan laporan kinerja perusahaan. Dengan adanya manipulasi terhadap laba maka pemakai laporan keuangan akan mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Praktek manajemen laba mengakibatkan laporan keuangan kehilangan kepercayaan pemakai laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Rusmin (2010) meneliti tentang kualitas auditor dan manajemen laba, dengan menggunakan bukti dari Singapura. Penelitian ini fokus pada manajemen laba dalam menanggapi tekanan antara investor, pembuat kebijakan dan *good corporate governance* untuk mengurangi perilaku oportunistik yang berlebihan di kalangan manajemen perusahaan.

Indriani (2010) juga melakukan penelitian mengenai kualitas auditor dengan manajemen laba. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan antara lain, kualitas auditor, *corporate governance*, *leverage* dan kinerja keuangan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba adalah kualitas auditor,

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan *Current Asset Ratio*. Pamudji dan Trihartati (2009) meneliti tentang pengaruh independensi dan keefektifan komite audit terhadap manajemen laba, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan karakteristik komite audit tidak memiliki dampak signifikan pada manajemen laba, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan komite audit hanya menggambarkan bentuk ketaatan terhadap peraturan.

Midiastuty dan Machfoedz (2003) meneliti hubungan mekanisme *corporate governance* seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan jumlah dewan direksi terhadap praktik manajemen laba oleh manajer dan kualitas laba. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Sementara itu jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Easterbrook (1984) menyatakan bahwa pemegang saham akan melakukan pengawasan terhadap manajemen, namun bila biaya pengawasan tersebut tinggi maka pemegang saham akan menggunakan pihak ketiga (*debtholders* atau *bondholders*) untuk membantu melakukan pengawasan. Sesuai dengan pernyataan tersebut, pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan yang handal adalah pemegang saham mayoritas (terkonsentrasi), institusional atau terkonsentrasi pada pemilik institusional. Alasannya pemilik institusional sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kelebihan dibanding investor individual. Dari sisi pendanaan pemilik institusional lebih kuat dibanding pemilik individual. Pada umumnya pemegang saham mayoritas (konsentrasi kepemilikan institusional) menyerahkan

pengelolaan investasinya pada divisi khusus dengan menunjuk profesional yang memiliki keahlian dibidang analis dan keuangan, sehingga pemilik mayoritas dapat memantau perkembangan investasinya dengan baik. Temuan Jiambalvo *et al.* (1996), Bushee (1998a, 1998b), Rajgopal *et al.* (1999), Mitra (2002), Madiastuty dan Machfoedz (2003) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dari temuan tersebut di atas menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang efektif dalam mengawasi kinerja manajer.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) mencari hubungan mekanisme *corporate governance* dan manajemen laba terhadap kualitas laba yang dilaporkan perusahaan. Variabel independen yang digunakan antara lain kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba tetapi kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan proporsi dewan komisaris justru berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa secara bersama – sama mekanisme *corporate governance* teruji signifikan terhadap manajemen laba.

Carcello, et al., (2006) meneliti hubungan antara keahlian keuangan komite audit dengan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat asosiasi antara keahlian keuangan dengan manajemen laba. Penelitian ini menyarankan bahwa

alternatif pendekatan tata kelola sama – sama efektif dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Widiatmaja (2010) berusaha meneliti pengaruh antara mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba dan konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Penelitian tersebut menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris dan ukuran komite audit sebagai proksi *corporate governance*.

Penelitian tersebut menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu juga ditemukan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Murhadi (2009) meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik manajemen laba. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005 – 2007. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba yaitu CEO *duality* dan keberadaan pemegang saham pengendali. Sementara variabel independen lainnya seperti komisaris independen, komite audit dan juga koalisi pemegang saham di luar pemegang saham pengendali tidak memiliki dampak apapun terhadap praktik manajemen laba. Nasution dan Setiawan (2007) meneliti pengaruh dari *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada

20 bank umum yang terdaftar di BEJ selama periode waktu 2000 – 2004. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan, keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Tarjo (2008) melakukan penelitian pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berhubungan negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mudiastuty dan Machfoedz (2003). Guna dan Herawati (2010), penelitian ini meneliti tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* diproksi dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, dan komisaris independen. Independensi audit, *leverage*, kualitas audit, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini menyatakan *leverage*, kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1	Gideon SB. Boediono (2005)	Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur	Variabel dependen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris Variabel independen: manajemen laba Model: regresi berganda	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba
2	Sylvia Veronica dan Siddharta Utama (2005)	Pengaruh Struktur Kepemilikan , Ukuran Perusahaan, dan Praktek <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengelolaan Laba (<i>Earnings Management</i>)	Variabel dependen: manajemen laba Variabel independen: kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, ukuran KAP, proporsi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit Variabel kontrol: <i>debt</i> (total hutang dibagi total asset) Model: regresi berganda	Kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional berhubungan positif, ukuran perusahaan berhubungan negatif signifikan, ukuran KAP berhubungan negatif, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif, dan keberadaan komite audit berpengaruh negatif, sedangkan <i>debt</i> berpengaruh positif signifikan dengan manajemen laba

3	Carcello, <i>et al</i> (2006)	Pengaruh Hubungan Antara Keahlian Keuangan Komite Audit Dengan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	Variabel dependen : manajemen laba Variabel Independen : Keahlian keuangan komite audit	Tidak terdapat asosiasi antara keahlian keuangan dengan manajemen laba
4	Ujiyantho dan Pramuka (2007)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan	Variabel dependen : Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris Variabel independen : manajemen laba dan kinerja keuangan	1. Kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 3. Proporsi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba 4. Secara bersama – sama mekanisme <i>corporate governance</i> teruji signifikan terhadap manajemen laba 5. manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

				keuangan
5	Susiana dan Herawaty (2007)	Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan.	Variabel dependen : Integritas laporan keuangan diukur dengan indeks konservatisme Variabel Independen : Independensi, mekanisme <i>corporate governance</i> diproksikan dengan presentase kepemilikan institusi, persentase kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen	Penelitian ini menghasilkan hasil bahwa independensi auditor, mekanisme <i>corporate governance</i> dan kualitas audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan
6	Tarjo (2008)	Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba Nilai Pemegang Saham Serta <i>Cost of Equity Capital</i>	Variabel dependen: manajemen laba, nilai pemegang saham, dan <i>Cost of Equity Capital</i> Variabel independen: kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> Model: analisis jalur dengan <i>Partial Least Square (PLS)</i>	Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba
7	Pamudji dan Trihartati (2009)	Pengaruh Independensi dan Keefektifan Komite	Variabel dependen : manajemen laba Variabel independen :	Keseluruhan karakteristik komite audit tidak memiliki dampak

		Audit Terhadap Manajemen Laba	Independensi dan keaktifan komite audit	signifikan pada manajemen laba, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan komite audit hanya menggambarkan ketaatan terhadap peraturan
8	Murhadi (2009)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Praktik Manajemen Laba Oleh Perusahaan	Variabel dependen : Manajemen laba Variabel independen : <i>good corporate governance</i>	1. CEO Duality dan keberadaan pemegang saham berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2. komisaris independen, komite audit, koalisi pemegang saham tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
9	Tri Widyastuti (2009)	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba	Variabel independen : Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, <i>size</i> , <i>leverage</i> , profitabilitas Variabel dependen : manajemen laba	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>earnings management</i> , ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan

				terhadap <i>earnings management</i>
10	Welvin I Guna dan Herawaty (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> , Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba	Variabel dependen : Manajemen laba Variabel independen : Mekanisme <i>good corporate governance</i> (kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi auditor, <i>leverage</i> , kualitas audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan	Hasil Penelitian menemukan bahwa <i>leverage</i> , kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
11	Widiatmadja (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba dan Konsekuensi Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel dependen : Manajemen laba dan kinerja keuangan Variabel independen : Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, ukuran komite audit	1. Kepemilikan manajerial dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 3. Manajemen laba berpengaruh signifikan

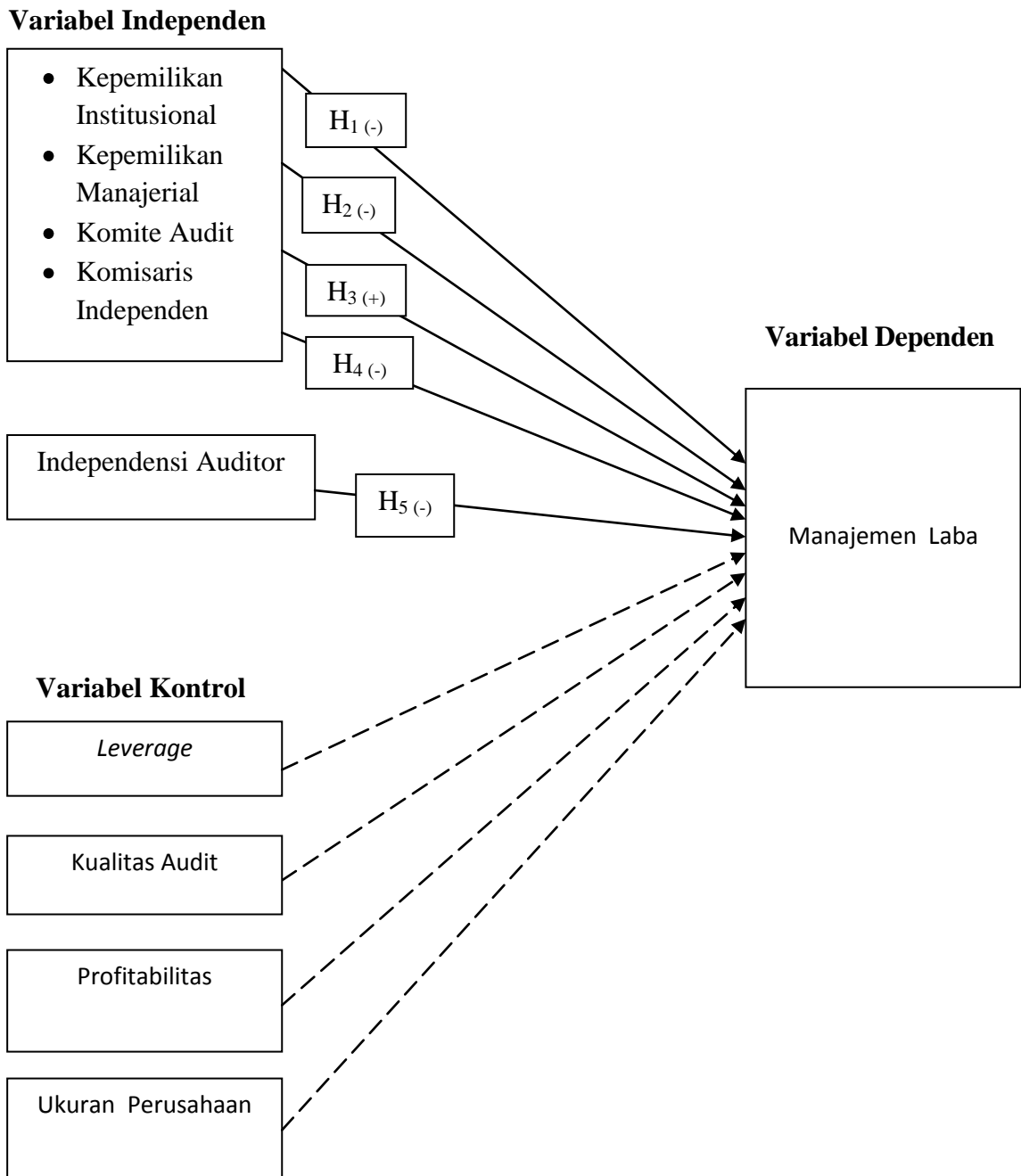
				terhadap kinerja keuangan
12	Yohana dan Laksito (2010)	Pengaruh Kualitas Auditor, <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba	Variabel independen : kualitas auditor, <i>corporate governance</i> , <i>leverage</i> dan kinerja keuangan. Variabel dependen : manajemen laba	Variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba adalah kualitas auditor, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan <i>Current Asset Ratio</i>
13	Prasetyo (2011)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Bonus plans</i> , <i>Debt Covenant</i> , dan <i>Firm Size</i> Terhadap Manajemen Laba	Variabel dependen : Manajemen Laba. Variabel independen : Komisaris independen, komite audit, reputasi auditor, <i>bonus plans</i> , <i>debt covenant</i> , <i>firm size</i>	<i>Firm size</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba

2.3 Kerangka Pemikiran

Di bawah ini, pada gambar 2.3.1 adalah bagan yang menggambarkan hubungan antara variabel independen antara lain : kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen dan independensi auditor. Variabel kontrol antara lain : *leverage*, kualitas audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Dengan variabel dependen yaitu manajemen laba.

Gambar 2.3.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Setiawati (2002) menyatakan manajemen laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Dalam penelitian ini, manajemen laba diukur dengan menggunakan proksi *Discretionary Accrual* (DA) yang diukur dengan menggunakan model Jones (1991). Davidson (1987) dalam Schipper (1989) yang dikutip dari Meutia (2004) menyatakan manajemen laba sebagai proses dilakukannya langkah-langkah yang disengaja dalam batasan prinsip-prinsip akuntansi untuk memperoleh tingkat pendapatan yang diinginkan. Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan pemegang saham dalam menilai prestasi ekonomi yang dicapai oleh perusahaan.

Defond (1997) menyatakan manajemen laba merupakan suatu upaya yang dipraktikkan bagi perataan pendapatan. Pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut bukanlah pendapatan yang diperoleh pada periode itu saja akan tetapi merupakan perataan pendapatan baik bagi periode sekarang maupun periode akan datang. Sedangkan Scoot (2006) mengatakan manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari Standar Akuntansi Keuangan yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka atau nilai pasar perusahaan. Laporan keuangan berdasarkan akuntansi

akrual memberi kesempatan bagi manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan laba.

Manajemen laba merupakan fenomena yang sukar dihindari karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Manajemen laba timbul sebagai dampak dari penggunaan akuntansi sebagai salah satu alat komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan kelemahan inheren yang ada pada akuntansi yang menyebabkan adanya *judgement* (Setiawati, 2002). *Discretionary accrual* adalah komponen akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sesungguhnya. De Angelo (1986) yang dikutip dalam Meutia (2004) menyatakan konsep model akrual memiliki dua komponen, yaitu komponen *non-discretionary* dan *discretionary*. Komponen *discretionary accruals* merupakan bagian dari akrual yang memungkinkan manajer melakukan intervensinya dalam memanipulasi laba perusahaan.

Hal ini disebabkan karena manajer memiliki kemampuan untuk mengontrolnya dalam jangka pendek. Komponen *discretionary accruals* diantaranya terdiri dari penilaian piutang, pengakuan biaya garansi (*future warranty expense*) dan aset modal (*capitalization assets*). Sedangkan komponen *non-discretionary accruals* ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diawasi oleh manajer.

2.4.2 Good Corporate Governance

Dalam mengimplementasikan *good corporate governance* dibutuhkan suatu bentuk mekanisme (*corporate governance mechanism*) yang dapat dipertanggungjawabkan. *Corporate governance mechanism* merupakan aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut yang akan menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Syakhroza, 2005).

Sulistyanto dan Wibisono (2003) mengemukakan bahwa *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

2.4.3 Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005). Investor institusional dianggap *sophisticated investors* yang tidak mudah "dibodohi" oleh tindakan manajer (Midiastuty dan Machfoedz, 2003). Saham yang dimiliki pihak institusional dapat mempengaruhi

dan mengendalikan pihak manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan. Cornertt et al., (2006) membuktikan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Menurut Gideon dalam Ujiyanto dan Pramuka (2007) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Menurut Slovin dan Sushka sebagaimana dikutip oleh Wahyudi dan Pawestri (2006), nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat *monitoring* yang efektif. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.4 Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba

Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang bukan sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria: (a) perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik; dan (b) perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono, 2005). Siallagan dan

Machfoedz (2006) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi kualitas laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka *discretionary accrual* semakin rendah. Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Penelitian mereka membuktikan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Ujiyantho dan Pramuka (2007) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Dhaliwal *et al.*,(1982), Morck *et al.*,(1988) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), serta Midiastuty dan Machfoedz (2003). Boediono (2005) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen, semakin tinggi besaran manajemen laba pada laporan keuangan. Penelitian Rachmawati dan Triatmoko (2007) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laba yang diukur dengan *discretionary accruals*.

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty, 2005). Investor institusional dan manajemen memiliki insentif yang kuat untuk mendapatkan informasi pra-

pengungkapan (*predisclosure information*) mengenai perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab fidusiarinya serta untuk meningkatkan kinerja portofolio mereka (Darmawati, 2003). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.5 Komite Audit dan Manajemen Laba

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Mayangsari, 2004). Komite audit bertanggung jawab mengawasi laporan keuangan, audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Selain itu dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan *earnings management* dengan cara mengawasi pelaksanaan audit eksternal (Siallagan dan Machfoedz (2006).

Nasution dan Setiawan (2007) membuktikan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan perbankan mampu mengurangi manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memenuhi tanggung jawabnya, diantaranya memastikan jalannya

perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, operasi perusahaan telah dijalankan secara beretika dan pengawasan yang efektif terhadap konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan telah dilakukan. Wedari (2004) juga membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *discretionary accrual*. Hal ini berarti secara rata-rata aktivitas manajemen laba pada perusahaan yang memiliki komite audit lebih rendah daripada perusahaan yang tidak memiliki komite audit.

Tujuan dari keberadaan komite audit di perusahaan seperti yang diungkapkan dalam Susiana dan Herawaty (2007) adalah: (1) memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan; (2) Memberikan kepastian bahwa pengendalian internal perusahaan telah memadai; (3) Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti kemungkinan penyimpangan material dalam bidang keuangan dan implikasi hukumnya; (4) Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor eksternal yang akan melakukan audit di perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃ : Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.4.6 Komisaris Independen dan Manajemen Laba

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* 2004). Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (Mayangsari 2003). Komposisi dewan komisaris dapat mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Nasution dan Setiawan (2007) membuktikan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti makin banyak komisaris independen maka semakin kecil terjadinya manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen telah efektif menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba. Hal ini didukung Chtourou *et al.*, (2001) dan Wedari (2004) bahwa dewan komisaris yang independen akan membatasi aktivitas pengelolaan laba. Ujiyantho dan Pramuka (2007), Boediono (2005), Siregar dan Utama (2005), serta Siallagan dan Machfoedz (2006) menemukan hasil yang lain. Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun (Boediono, 2005). Siregar

dan Utama (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan GCG. Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survei *Asian Development Bank* dalam Boediono (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₄ : Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.7 Independensi Auditor dan Manajemen Laba

Independensi auditor akan berdampak terhadap pendeteksian manajemen laba. Auditor yang independen merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi terjadinya manajemen laba. Independensi auditor dinilai dari lamanya penugasan auditor tersebut di perusahaan yang sama. Semakin lama auditor melaksanakan audit pada suatu perusahaan, maka auditor dianggap tidak independen. Independensi seorang akuntan publik merupakan suatu hal yang bersifat mutlak, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam (Ikatan Akuntan Indonesia 2001) yang berbunyi "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor." Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun kesempurnaan keahlian teknis yang auditor

miliki, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur. Untuk diakui oleh pihak lain sebagai orang yang independen, auditor harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, baik dengan manajemen perusahaan ataupun pemilik perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001:220.1). Auditor juga harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya. Profesi Akuntan Publik telah menetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensinya dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₅ : Independensi Auditor memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai definisi dan operasionalisasi variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, metode pengumpulan data dan metode analisis. Berikut penjelasan secara rinci.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*) dan variabel kontrol (*control*). Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan akrual diskresioner (*discretionary accruals*). Sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen dan independensi auditor. Variabel kontrol adalah variabel yang mengontrol hubungan variabel dependen dan variabel independen dan pasti berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, kualitas audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

3.1.2 Definisi Operasional

3.1.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Sekaran, 2003). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Penyajian laba merupakan hal yang sering dimanipulasi oleh pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang terlihat menguntungkan. Usaha ini disebut dengan manajemen laba. Pengukuran manajemen laba dilakukan dengan dengan cara menghitung *discretionary accruals*.

Discretionary accruals yang digunakan sebagai proksi **manajemen laba** dalam penelitian ini merupakan modifikasi *cross sectional* dari model *Jones*, (1991), yang dapat mendeteksi manajemen laba secara konsisten (Sanjaya, 2008). Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai *total accruals* untuk sampel perusahaan yang terpilih dengan pendekatan *cash flow* adalah sebagai berikut:

$$TA_{it}/A_{it-1} = (NI_t - OCF_t)/A_{it-1}$$

Keterangan:

TA_{it} : *Total Accruals* pada periode t

A_{it-1} : Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir periode t-1

NI_t : Laba bersih operasi (*net operating income*) periode t

OCF_t : Aliran kas dari aktivitas operasi (*operating cash flow*) pada periode t.

Setelah diperoleh nilai *total accruals*, dilakukan regresi untuk mem-

peroleh angka koefisien α_1 , α_2 , dan α_3 dengan variabel dependen *total accruals* dan variabel independen adalah total aset tahun sebelumnya (t-1), perubahan pendapatan, dan total aset tetap kotor perusahaan pada tahun ke-t. Setelah diperoleh nilai koefisien regresi α_1 , α_2 dan α_3 , maka dilanjutkan dengan menghitung komponen *nondiscretionary accruals*. Model *nondiscretionary accruals* dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

NDA_{it} : *Nondiscretionary accruals* pada periode t

A_{it-1} : Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir periode t-1

ΔREV_{it} : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_{it} : Aset tetap (*gross property plant and equipment*).

ϵ_{it} : : Sampel *error* perusahaan i pada periode t.

Langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari *discretionary accruals* dengan mengurangi nilai TA_{it} dengan nilai NDA_{it} .

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it} : *Discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

TA_{it}/A_{it-1} : *Total accruals* perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} : *Nondiscretionary accruals* perusahaan i pada tahun t.

3.1.2.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang membantu

menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2003). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan *investment banking* (Siregar dan Utama 2005). Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan.

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor institusi}}{\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}}$$

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty 2007). Kepemilikan manajerial diukur menggunakan skala rasio melalui persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$\text{KPMJ} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen}}{\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}}$$

3. Komite Audit

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit yang

berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit (Isnanta 2008).

$$KMA = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit dari luar}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}}$$

4. Komisaris Independen

Komisaris independen diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Isnanta 2008).

$$KI = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan}}{\text{Seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

5. Independensi Auditor

Independensi auditor melalui proksi lama penugasan audit diukur menggunakan skala nominal dengan variabel *dummy*. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang menggunakan auditor yang sama dalam 3 tahun atau lebih, yang berarti tidak memiliki sikap independen. Angka 0 digunakan untuk perusahaan yang mengganti auditornya dalam waktu kurang dari 3 tahun, yang berarti memiliki sikap independen.

3.1.2.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan 4 variabel kontrol untuk mengontrol faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Variabel kontrol adalah variabel yang mengontrol hubungan variabel dependen dan variabel independen dan pasti berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, kualitas audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

1. Leverage

Leverage diukur dengan menggunakan skala rasio total hutang terhadap total aset. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur variabel *leverage* adalah:

$$LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2. Kualitas Audit

Kualitas audit sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur melalui proksi ukuran KAP tempat auditor tersebut bekerja, yang dibedakan menjadi KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four* seperti dalam penelitian (Susiana dan Herawaty 2007). Kualitas audit diukur dengan skala nominal melalui variabel *dummy*. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka 0 digunakan untuk mewakili perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *Non-Big Four*.

3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio *Return on Assets (ROA)* yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap total aset, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan hasil logaritma dari total aset. Total aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan pertimbangan total aset perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Wuryatiningsih 2002 dalam Sudarmadji dan Sularto 2007).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang *listed* di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2014. Sampel adalah bagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili karakteristiknya. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia minimal sejak Desember 2009-2014 dan tidak mengalami *delisting* selama periode penelitian.
2. Menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya.
3. Memiliki akhir tahun buku 31 Desember dalam laporan keuangannya.
4. Melaporkan *net income* dan *operating income* serta arus kas positif dari aktivitas operasi secara berturut-turut selama 5 tahun periode penelitian (2010-2014).

33 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi dan data sekunder dari perusahaan sektor manufaktur yang telah terdaftar di BEI dan diperoleh melalui website BEI (<http://www.idx.co.id>).

34 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mengolah literatur, jurnal, artikel dan atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

35 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2006). Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. *Mean* digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk

mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini didasarkan pada uji statistik sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan *skewness* untuk semua variabel dependen dan independen. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan melihat grafik *normal P plot of regression statistics*. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik pada sumbu diagonal dari grafik). Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

Untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan menggunakan grafik, maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis

H₀ : data residual berdistribusi normal

H_A : data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan pada *one sample kolmogorov-smirnov* adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data residual. Jika angka probabilitas $< \alpha = 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas $> \alpha = 0,05$ maka H_A ditolak yang berarti variabel berdistribusi secara normal (Ghozali, 2006).

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolonieritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolonieritas yaitu :

- a. Nilai R square (R²) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak terikat.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- c. Melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2006).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut

terjadi heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya varian tidak sama untuk variabel bebas yang berbeda (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas).

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* dengan ketentuan:

- a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain menggunakan grafik *scatterplots*, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Jika probabilitas signifikan > 0.05 , maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi tersebut terjadi autokorelasi atau tidak, diperlukan uji autokorelasi yang bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dapat dikatakan terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2006). Autokorelasi muncul karena penelitian yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji autokorelasi antara lain dapat dilakukan dengan melakukan Uji *Durbin Watson*, Uji *Langrange Multiplier*, Uji *Statistics Q: Box Pierce* dan *Ljung Box*, dan *Run Test* (Ghozali, 2006). Uji statistik yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Uji *Durbin Watson*.

3.5.3 Uji Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi menggunakan taraf signifikansi pada level 5% ($\alpha = 0,05$). Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$DA = \beta_0 + \beta_1 INST + \beta_2 KPMJ + \beta_3 KMA + \beta_4 KI + \beta_5 INDP + \beta_6 LEV + \beta_7 K_AUD + \beta_8 ROA + \beta_9 UK_PRSH + \acute{\epsilon}$$

Keterangan: DA *Discretionary Accruals*, INST Kepemilikan Institusional, KPMJ Kepemilikan Manajemen, KMA Komite Audit, KI Komisaris Independen, INDP Independensi Auditor, LEV *Leverage*, K_AUD Kualitas Audit, ROA *Return on Assets* (profitabilitas), UK_PRSH Ukuran Perusahaan, $\acute{\epsilon}$ error term.

Analisis terhadap hasil regresi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2006).

2. Uji signifikansi simultan (uji statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama dengan variabel terikat (Ghozali, 2006)

3. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Hipotesis diterima apabila memiliki taraf signifikansi dibawah 5% atau $\alpha < 0,05$. (Ghozali, 2006).